

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KOTA SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Ciceri Serang Provinsi Banten  
Telephone / Fax : (0254) 8243012**

# LAMPIRAN

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga telah dapat disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi Pertanggung jawaban suatu Instansi dalam mencapai Tujuan/ Sasaran Strategis Instansi. Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen Perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksud sebagai Laporan Pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang kepada Walikota Serang dalam melaksanakan sebagian tugas – tugas Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian yang meliputi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami harapkan kepada semua pihak koreksi dan sarannya, serta tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini.

Serang, Januari 2022

**Kepala Dinas  
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kota Serang**



**Dr.H. IKBAL, S.Pd,M.Kes**  
Pembina TK.I/ IV.b  
NIP. 19680304 199003 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF  
(EXECUTIF SUMMARY)

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, berdasarkan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

LKjIP Tahun 2021 ini merupakan Laporan Kinerja Tahun ke 3 (Tiga) atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini melaporkan Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang yang telah diperjanjikan.

Dalam dokumen Renstra 2019 – 2023 Pemerintah Kota Serang menetapkan 4 (empat) Misi yaitu :

**MISI I : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI- NILAI KEMANUSIAAN.**

MISI II : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

MISI III : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING.

MISI IV : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Ke 4 (empat) Misi tersebut di jabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis. Masing- masing Sasaran Strategis yang ditetapkan mempunyai Indikator Kinerja sebagai alat untuk mengukur Tingkat Ketercapaiannya. Setiap Tahun Indikator Kinerja di ukur Tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai Target dan Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3 Landasan Hukum.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
1.5 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	10
a. Tugas,Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	10
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
c. Isu Setrategis.....	24
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>25</b>
2.1. Perencanaan Kinerja.....	25
2.2. Visi.....	26
2.3. Misi.....	27
2.4. Tujuan dan Sasaran.....	28
2.5. Strategis Kebijakan.....	31
2.6. Indikator Kinerja Utama.....	32
2.7. Perjanjian Kinerja.....	33
2.8. Rencana Anggaran tahun 2021 .....	35
2.9. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja.....	45
<b>BAB III : Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>45</b>
A. Pengukuran Kinerja.....	60
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 .....	67

<b>BAB IV : Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2021 .....</b>	<b>70</b>
A. Laporan Hasil Evaluasi atas LkjlP tahun 2020.....	70
B. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi tahun 2021 .....	72
<b>BAB V : Penutup.....</b>	<b>74</b>

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Amanat Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang- Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian mengamanatkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar Masyarakat.

Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja sangat diperlukan dalam Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja serta peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan keluarganya untuk menjamin hak-hak dasar Pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk pemerataan Pembangunan Daerah melalui penyebaran Penduduk yang seimbang dengan daya

dukung alam dan daya tampung lingkungan serta kearifan lokal dengan nilai budaya dan adat istiadat Masyarakat.

Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Penempatan Tenaga Kerja Yang Masih Cukup Rendah, Baik Sektor Formal maupun Sektor Informal
4. Ketidaksesuaian antara kemampuan SDM dengan kebutuhan Pasar Tenaga Kerja sehingga tidak memenuhi Persyaratan
5. Peningkatan Life Skill Pencari Kerja
6. Belum Kondusifnya Kondisi Hubungan Industrial
7. Rendahnya Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang- undangan ketenagakerjaan.
8. Terbatasnya Kuota bahkan tidak adanya Penempatan Transmigran selama dua tahun ini.

Dilakukan dengan pendekatan sistem Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Sistem Ketenagakerjaan tersebut pada saat sebelum

hubungan kerja (Pra Employment) yaitu yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon Tenaga Kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/ mengakses lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di Luar Negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh Tenaga Kerja sebelum mendapat pekerjaan meliputi :

1. AKAD atau Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri.
2. AKAN atau Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
3. Wajib Laport Lowongan Pekerjaan.
4. Wajib Laport Tenaga Kerja di Pasaran.
5. Pelatihan Kerja.

Pada saat dalam Hubungan Kerja (During Employment) adalah hubungan antara Pekerja dengan Pengusaha yang terjadi setelah adanya Perjanjian Kerja, yaitu suatu Perjanjian dimana Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pihak Perusahaan/ Majikan dengan menerima upah dari Majikan/ Pengusaha, menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan Pekerja dengan membayar upah Hubungan Kerja dimaksud meliputi :

1. Perlindungan Norma Kerja.
2. Pengawasan Ketenagakerjaan.
3. Hubungan Industrial.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. Perlindungan upah.
6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Mogok Kerja dan Penetapan Perusahaan.

Pada sa'at setelah Hubungan Kerja (Post Employment) adalah yang terkait dengan Tenaga kerja pada saat purna kerja termasuk PHK dan hak-haknya akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja meliputi :

1. Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Hak - Hak Tenaga Kerja yang diputuskan Hubungan Kerja.

Sedangkan sistem Ketrasmigrasian merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penyiapan permukiman dalam bentuk kesiapan Permukiman yang layak huni, Layak usaha, dan Layak berkembang, Pengerahan dan Penempatan serta Pembinaan Transmigrasi dan Pembinaan Lingkungan Permukiman Transmigrasi sampai dengan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah.

Dengan demikian penyelenggaraan Transmigrasi akan mendorong perluasan dan pengembangan investasi oleh Badan Usaha dan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada, sehingga pada gilirannya dapat menciptakan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha yang lebih luas dan merata serta tumbuhnya Daerah dan wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka

penyelenggaraan Transmigrasi membuka kesempatan bagi Penduduk dari daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan menetap guna meningkatkan kesejahteraannya sekaligus mendorong kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan Penduduk sekitar.

Untuk memperbaiki kondisi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat Kota Serang maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya melaksanakan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui beberapa Strategi Kebijakan yaitu :

1. Penciptaan Lapangan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri melalui pengembangan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, pengembangan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja muda dan pengembangan padat karya produktif;
2. Revitalisasi dan renovasi sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM dan kuantitas instruktur UPT. Balai Latihan Kerja serta pendayagunaan Lembaga Pelatihan Swasta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja berbasis kompetensi; dan bertaraf Internasional.
3. Mengembangkan Hubungan Industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta
5. Memperkuat jejaring kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kab/ kota dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenagakerjaan;
6. Mendorong pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) pada wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Untuk melaksanakan strategi di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus didukung dengan sumber daya, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sarana dan Prasarana, serta anggaran yang memadai. Konsep dukungan tersebut dalam dokumen rencana strategis Disnakertrans yang secara operasional dijabarkan dalam dokumen Perencanaan Tahunan.

Dalam dokumen RPJMD Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2019 - 2023 kondisi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diharapkan mampu mewujudkan kesepakatan Masyarakat melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada setiap

Tahunnya wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Serang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut merujuk pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2019 - 2023 dan menetapkan Program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini disusun sebagai bentuk Pertanggung jawaban Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara tertulis kepada Walikota Serang atas pencapaian kinerja Indikator Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

LKjIP Kota Serang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 serta diubah beberapa kali menjadi undang – undang nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021;



#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menjelaskan penyampaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2021. Capaian Kinerja tersebut juga dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya untuk mengukur Keberhasilan/ Kegagalan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.

Selain itu, capaian kinerja Tahun 2021 juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti itu, Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang adalah sebagai berikut :

- Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan gambaran umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sekilas pengamatan lainnya.

- Bab II (Perencanaan dan Perjanjian kinerja)

Menjelaskan tentang tifisan beberapa hal penting dalam Perencanaan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

- Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pengungkapan dan perjanjian dari hasil Penetapan Kinerja

- Bab IV (Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2021)  
Menjelaskan tentang Tidak lanjut hasil rekomendasi evaluasi penilaian laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya.
- Bab V (Penutup)  
Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.

## **1.5 GAMBARAN PELAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas ekonomi Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, dan Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang dan berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Walikota Serang Nomor 11 tahun 2021

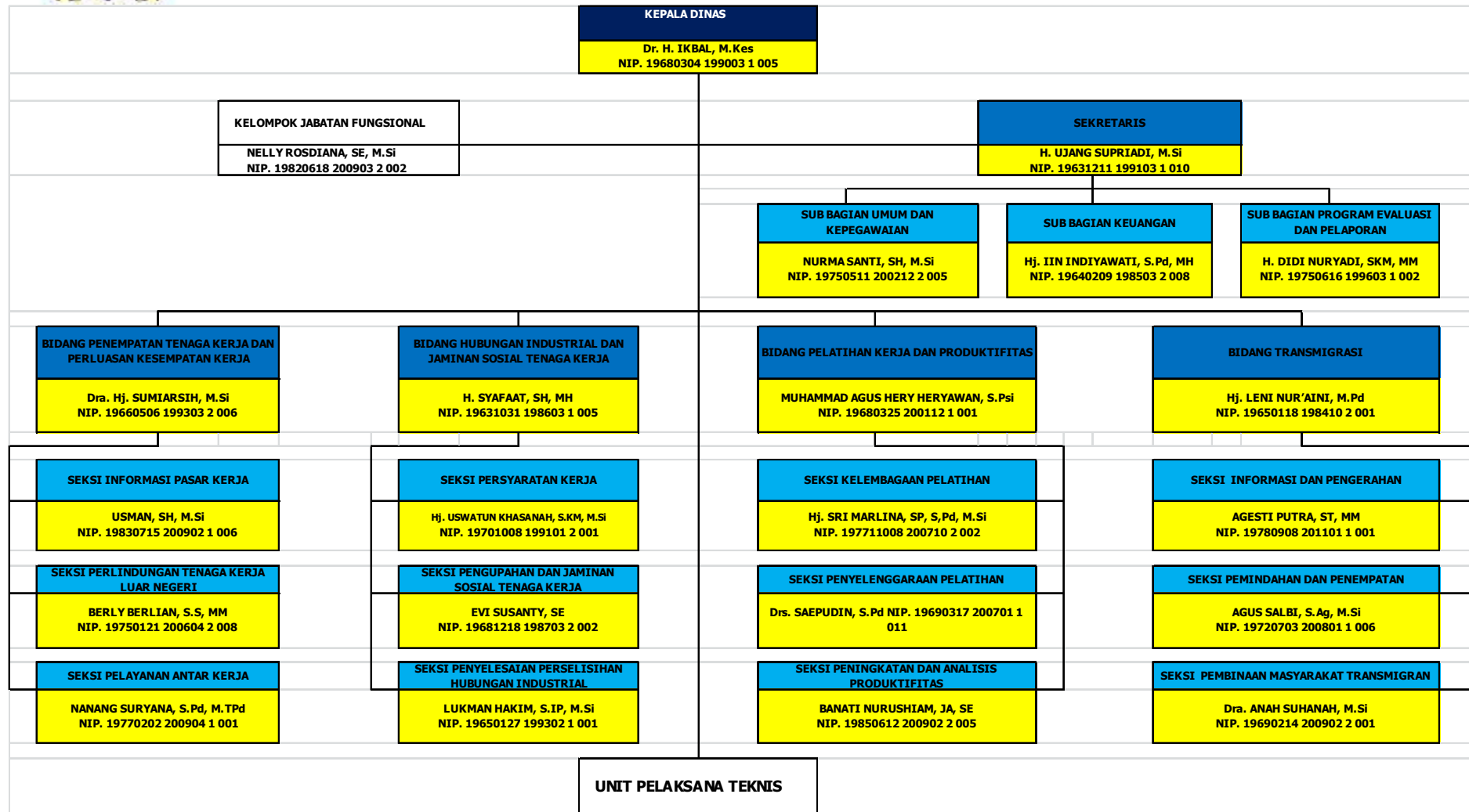
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, membawahi :
    - a) Seksi kelembagaan Pelatihan
    - b) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan
    - c) Seksi Peningkatan dan Analisis Produktifitas
  2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan :
    - a) Seksi Informasi Pasar Kerja
    - b) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan
    - c) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja

- 3 .Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,  
membawahkan :
- a) Seksi Persyaratan Kerja
  - b) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan
  - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
- a) Seksi Informasi dan Pengerahan
  - b) Seksi Pemindahan dan Penempatan dan
  - c) Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigran
5. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG TAHUN 2021



## **b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Untuk mencapai kinerjanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang didukung oleh beberapa Sumber Daya antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Barang Milik Pemerintah.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021, Jumlah Aparatur Sipil Negara sejumlah 27 Orang dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Menurut Jabatan

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Jabatan struktural sejumlah | : 21 Orang |
| 2. Jabatan Fungsional sejumlah | : 1 Orang  |
| 3.                             |            |
| 4. Staf pelaksana sejumlah     | : 5 Orang  |

#### b. Menurut Golongan

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Golongan I sejumlah   | : -        |
| 2. Golongan II sejumlah  | : -        |
| 3. Golongan III sejumlah | : 19 Orang |
| 4. Golongan IV sejumlah  | : 8 Orang  |

#### c. Menurut Pendidikan

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. SMA sejumlah | : |
|-----------------|---|

2. D3 sejumlah : -
3. D1 sejumlah : -
4. S1 sejumlah : 5 Orang
5. S2 sejumlah : 20 Orang
6. S3 sejumlah : 2 Orang

## **2. Sumber Daya Anggaran**

Dalam mencapai kinerjanya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBD, sesuai dengan DPA Tahun 2021, Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara keseluruhan mempunyai alokasi sebesar Rp.7.851.608.419,- sedangkan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 7.705.162.110,- atau dengan presentasi sebesar 98,13%. Laporan Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Kota Serang Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Provinsi Banten.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG  
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.647.933.485</b>	<b>5.543.184.743</b>	<b>98,15%</b>
1	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BAGIAN PEP)	176.159.750	174.486.500	99,50
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.363.000	95.403.500	99,05
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2.569.000	2.569.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.394.000	2.394.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.368.000	2.368.000	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.368.000	2.368.000	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.097.750	69.384.000	98,98



	<b>Administerasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4.376.482.778	3.972.976.574	90,66
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.298.342.278	4.309.200.577	98,46
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	993.000	993.000	100
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	77.147.500	77.107.500	99,95
	<b>Bagian Umum dan Kepegawaian</b>			
11	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	38.200.000	38.200.000	100
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.200.000	38.200.000	100
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.010.000	27.010.000	100
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.278.992	449.968.714	97,34
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.893.140	7.834.000	99,25
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.821.405	152.912.650	97,51

17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.439.485	38.360.500	94,86
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.736.000	20.736.000	100
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.987.202	53.676.900	99,43
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.476.760	22.230.000	90,82
21	Fasilitas Kunjungan Tamu	34.040.000	31.353.000	92,11
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.885.000	122.865.664	99,18
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	148.650.000	86.444.892	58,15
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	24.825.487	61,75
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.180.000	78.960.000	99,72
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.421.965	440.533.465	98,24

26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402.261.965	394.374.465	98,04
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.160.000	46.159.000	100,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	832.031.500	828.081.500	99,53
28	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	586.995.500	586.995.500	100,00
29	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92.920.000	90.970.000	97,90
30	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	60.370.000	60.370.000	100
31	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.746.000	89.746.000	97,82
<b>III</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	751.383.434	729.108.867	97,04
32	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	436.947.641	427.247.000	97,78

33	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	195.329.555	189.947.000	97,24
34	Pelayanan Antar Kerja	120.708.086	117.110.000	97,02
35	Perluasan Kesempatan Kerja	120.910.000	120.190.000	99,40
36	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	26.136.000	23.886.000	91,39
37	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	131.000.000	122.156.250	93,25
38	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	157.299.793	155.819.617	99,06
<b>IV</b>	<b>Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</b>	314.099.250	307.496.250	97,90
39	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.679.250	113.761.250	96,67

40	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.012.500	33012500	100
41	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.856.750	42.856.750	100
42	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	41.810.000	37.892.000	90,63
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Transmigrasi</b>	306.160.750	297.290.750	97,10
43	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.985.750	157.705.750	98,57
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	112.025.000	110.195.000	98,37
45	Penyuluhan Transmigrasi	47.960.750	47.510.750	99,06

46	Penguat SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	146.175.000	139.585.000	95,49
----	--	-------------	-------------	-------

### **3. Sumber Daya Barang Milik Pemerintah**

Barang milik Pemerintah Kota Serang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 berasal dari dana APBD sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 71.366,000,- dengan rincian sebagai berikut :

**DAFTAR PENGADAAN BARANG**

**Semester II Tahun 2021**

NO	Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SPM/Kwitansi		J U M L A H			Dipergunakan pada Unit	Ket.
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7X8)	10	11
1	Belanja Modal Pengadaan Computer PC UNIT	25/02/2021	027/ 03.15 - SPK/DTKT/2021	3/12/2021	017/ SPU/III/2021	4	9,498,500	37,994,000	DISNAKERTRANS	CV. SINAR PALKA UTAMA
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer ( PRINTER ALL IN ONE )	25/02/2021	027/ 03.15 - SPK/DTKT/2021	3/12/2021	017/ SPU/III/2021	2	3,998,500	7,997,000	DISNAKERTRANS	CV. SINAR PALKA UTAMA
3	Belanja Gorden Vertical Blind	27/04/2021	027/08.05-SP/DTKT/2021	04/05/2021	012/SEWELAS/V/2021	50 M	467,500	23,375,000	DISNAKERTRANS	CV. SEWELAS
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) / Tangga Multifungsi	12/24/2021	0327/DISNAKERTRANS/SPM.TU-NIHIL/XII/2021	12/24/2021	0327/DISNAKERTRANS/SPM.TU-NIHIL/XII/2021	1	2,000,000	2,000,000	DISNAKERTRANS	Toko Bangunan Hidup Baru
<b>J U M L A H</b>						<b>7</b>	<b>15,964,500</b>	<b>71,366,000</b>		

### **c. Isu Strategis dan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, sudah barang tentu Disnakertrans Kota Serang mempunyai isu dan permasalahan yang di hadapi dalam melaksanakan kinerja pelayanannya.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diformulasikan dalam 4 (empat) Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Program Penyelenggaraan Transmigrasi



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis tahun 2019-2023**

Ada beberapa dokumen Perencanaan Nasional yang menjadi dasar bagi Perencanaan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja, dari beberapa dokumen tersebut antara lain Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 mengatur Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi acuan bagi Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai kelanjutan telah ditetapkan Undang- Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN sedangkan di lingkungan Pemerintah Daerah di dasari oleh Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kinerja Pemerintahan, Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019 – 2023.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat Indikatif yang memuat Program Pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2023 dengan penekanan pada pencapaian sarana prioritas Pemerintah Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta permasalahan yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

## **1. VISI**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang merupakan salah satu Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap Visi Pembangunan Kota Serang Tahun 2019 – 2023.

Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen Perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun serta harus mengacu pada RPJMD dan berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Visi Kota Serang yang hendak dicapai pada Tahun 2019 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA “**

## **2. MISI**

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Serang Tahun 2019 – 2023 tersebut, maka Misi Pembangunan Kota Serang adalah sebagai berikut :

MISI I : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI- NILAI KEMANUSIAAN.

MISI II : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

MISI III : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING.

MISI IV : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Berkaitan dengan Misi Kota Serang, Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan dengan misi ke tiga Kota Serang, yaitu :

**Misi ke III : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing**

Dalam rangka mewujudkan Misi III tersebut, Pemerintah Daerah Kota Serang menetapkan Strategis Pembangunan Jangka Menengah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2019 – 2023 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2019 – 2023.

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :**

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja diantaranya :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Penempatan Tenaga Kerja
4. Mengembangkan Pemetaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6. Meningkatkan Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Meningkatkan Pelayanan Kepesertaan Transmigrasi

## **B. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja dan Meningkatnya Kepesertaan serta Ketahanan Hunian Transmigran, diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi dan perencanaan Tenaga Kerja
2. Peningkatan pelayanan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
3. Peningkatan pelayanan Tenaga Kerja yang ditempatkan
4. Peningkatan pelayanan pelatihan kerja
5. Pengembangan pelayanan pelatihan kewirausahaan
6. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
7. Peningkatan kepesertaan jaminan sosial Tenaga Kerja
8. Peningkatan kepesertaan Transmigran

**tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	CAPAIAN KINERJA			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,08	9,26	9,16	9,06	8,96	7,93	8,96	
		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Telah Berdaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Kesempatan Kerja	%	NA	91,92	90,75	90,95	91,05	91,45	92,07	91,45	
			Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	89	90	90	90,7	90,7	90,7	100	90,7	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Nilai	66,24	66,26	66,28	66,30	66,32	66,34	80	66,34	

## 2.3. STRATEGI KEBIJAKAN

### A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan Perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra melalui pendekatan yang komprehensif. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala Program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan Program indikatif untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) Hubungan yang rasional antara Visi dan Misi dengan Prioritas Program Kepala Daerah terpilih, (b) Hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu- isu strategis, (c) Pernyataan yang umum guna memandu pengembangan Program Pembangunan Tahunan selama lima Tahun, dan (d) Dikembangkan dalam suatu pemetaan Strategi Daerah. Dengan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian diformulasikan dalam 4 (empat) Program Pembangunan sebagai berikut :

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
7. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
8. Program Penyelenggaraan Transmigrasi

#### **2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Nomor :



Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,03
2	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Yang Berdaya	Persen	100
3	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja	Persen	91,97
4	Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigrasi	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigrasi	Persen	100
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah pada Lingkup Pemerintah daerah	Nilai Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Nilai	70

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih Tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang di sepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun – Tahun sebelumnya, sehingga terwujudnya kesinambungan Kinerja setiap Tahunnya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya	100%
		Persentase Kesempatan Kerja	90,95%
		Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	100%

2	Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	90,7%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	66,3%

## 2.6. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang melaksanakan kegiatan dengan anggaran Murni Sebesar Rp. 7.851.608.419,- Rencana Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2028-2023 dan Penyusunan Rencana Strategis sehingga Rencana Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Rencana Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang yang merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 7 (tujuh) Program yang dibagi 28 (dua puluh delapan) Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur :
  - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - d. Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD
  - e. Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - g. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan :
  - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

- c. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja :
- a. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
  - b. Pembinaan dan Konsultansi Perusahaan Kecil
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
5. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja :
- a. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja
  - b. Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja
  - c. Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat
6. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan :
- a. Pelaksanaan Peringatan Hari Buruh Internasional
  - b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
  - c. Penyusunan dan Perumusan UMK
  - d. Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hubungan Industrial
  - f. Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi
7. Program Penyelenggaraan Transmigrasi :
- a. Penyuluhan Program Transmigrasi
  - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Calon Transmigran

c. Pembinaan Transmigran Yang Sudah di Tempatkan

d. Pemindahan dan Penempatan Calon Transmigran

Nama OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG															
BIDANG URUSAN	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		KODE REKENING				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	12	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB (OPD DAN UNIT OPD)	
	2	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		5										7
1	2	3	4		5				6	7	8	12	13	21	
Tenaga Kerja													7.851.608.419	DISNAKERTRANS	
	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka								%			KEPALA DINAS	
		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya								%			KEPALA DINAS	
			Persentase Kesempatan Kerja								%				
			Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial								%				
					2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	68	832.031.500	Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas	
					2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase Peserta yg lulus uji kompetensi	%	100		Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	
					2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan keterampilan	org	75	586.995.500	
										Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	org	32			
					2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase LPK yang dibina	%	100			
					2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPK yang dibina	org	35	92.920.000	Seksi Kelembagaan Pelatihan
										Jumlah pengelola LPK yang dibina	LPK	25			
					2	07	03	2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	persentase perusahaan kecil yang telah dibina	%	100			
					2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina	perush	100	60.370.000	
					2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas peserta	%	100		Seksi Peningkatan dan Analisis Produktivitas	
					2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bintek/pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja	org	50	91.746.000	

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11		
				2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	%	7,5	751.383.434		
				2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan calon tenaga kerja	%	25			
				2	07	04	2.01	01	Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bimtek petugas pelayanan antar kerja	org	40	195.329.555	KABID Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
				2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bimtek calon tenaga kerja	org	200	120.708.086	Seksi Pelayanan Antar Kerja
				2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan (kewirausahaan)	org	70	120.910.000	
				2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang dibina	%	100		
				2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Koordinasi dan pembinaan kepada LPTKS (BKK, P3MI, dan LPTKS lainnya)	org	50	26.136.000	
				2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase dokumen informasi pasar kerja yang ditetapkan	%	100		
				2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Dokumen data dan Informasi pasar kerja (IPK)	dok	1	131.000.000	Seksi Pelayanan Antar Kerja
				2	07	04	2.03	03	Jobfair/Bursa Kerja	Kegiatan Job Fair				
				2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	Persentase perlindungan PMI	%	100		Seksi Informasi Pasar Kerja
				2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)	Jumlah peserta workshop calon pekerja migran Indonesia (PMI)	org	50	157.299.793	



1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
				2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	%	45	314.099.250		
				2	07	05	2,01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	%	100	196.420.000	Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	
				2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta Bimtek persyaratan kerja (E-PP dan PKB)	org	45	110.590.000	
				2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dokumen Monev pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan Data Sinergitas Ketenagakerjaan	dok	2	85.830.000	
									jumlah Peserta bimtek Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	perush	40		KABID Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
									Jumlah peserta rapat persiapan penetapan UMK Kota Serang	org	25			
				2	07	05	2,02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	100	117.679.250	Seksi Pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja	
				2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jml peserta kegiatan hari buruh internasional	org	50	33.012.500	Seksi Jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja
				2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen Rekomendasi LKS Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	dok	1	42.856.750	
									Jumlah bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial	org	100			
				2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Kesepakatan bersama LKS Tripartit, DEPEKO dan Gugus Tugas EEO dalam membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Serang dan meningkatnya SDM	dok	3	41.810.000	Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial

1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
KETRANSMIGRASI	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka						Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,95	306.160.750	KEPALA DINAS	
		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran						Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	90,7	306.160.750	KEPALA DINAS	
				3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%	30	159.985.750	Kabid Transmigrasi
				3	32	03	2.01		Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	30		
				3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen Kerjasama Antar Daerah	Dok	2	112.025.000	Seksi Pemindehan dan Penempatan
				3	32	03	2.01	05	Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Peserta sosialisasi/seleksi tentang program transmigrasi regional	org	60	47.960.750	
				3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran	KK	10	-	Seksi Informasi dan Pengerahan
				3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Dibina	%	57	146.175.000	Kabid Transmigrasi
				3	32	04	2.01		Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang dibina	%	100		Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigran
				3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah KK transmigran yang dibina di lokasi penempatan	KK	20	146.175.000	
<b>KESEKERTARIATAN</b>														
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah 60,24 - B								Nilai	66,32		KEPALA DINAS
						01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	5.647.933.485	Sekretaris Dinas
				2	07	01	2.01		Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	15	176.159.750	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
				2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan dan Dokumen perubahan Renstra, PK dan IKU	Dok	5	96.363.000	
				2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Dok	1	2.569.000	
				2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Dok	1	2.394.000	
				2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA	Dok	1	2.368.000	
				2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Dok	1	2.368.000	
				2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD,	Dok	2	70.097.750	
									Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	Dok	4			

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
				2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	3	4.376.482.778	Sub Bagian Keuangan
				2	07	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan	bulan	12	4.298.342.278	
				2	07	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1	993.000	
				2	07	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	2	77.147.500	
				2	07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	Dok	1	38.200.000	
				2	07	01	2.03	06 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD	dok	1	38.200.000	
				2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%	100	27.010.000	
				2	07	01	2.05	02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas harian	stel	28	27.010.000	
				2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%	100	462.278.992	Sub Bagian Umum Kepegawaian
				2	07	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	7.893.140	
				2	07	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	10	156.821.405	
									Jumlah Unit (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	unit	15		
				2	07	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	10	40.439.485	
				2	07	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	bulan	12	20.736.000	
				2	07	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	53.987.202	
				2	07	01	2.06	06 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	bulan	12	24.476.760	
				2	07	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan mamin kunjungan tamu	bulan	12	34.040.000	
				2	07	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan (perjalanan dinas)	bulan	12	123.885.000	
				2	07	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
				2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			
				2	07	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan	unit		
				2	07	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Unit meubeler	unit		
				2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	119.380.000
				2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	40.200.000
				2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kantor	bulan	12	79.180.000
									Jumlah event	event	3		
				2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	448.421.965
				2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	unit	21	402.261.965
				2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Yang Dipelihara	unit	69	46.160.000





		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Dokumen data dan Informasi pasar kerja (IPK)	Dokumen	1	131.000.000													
		Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia(PMI)	Jumlah peserta workshop calon pekerja migran Indonesia (PMI)	org	40	157.299.793													
Meningkatnya Hubungan Industrial	Pengezahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pengezahan Peraturan Perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah peserta Bimtek persyaratan kerja (E-PP dan PKB)	org	90	110.590.000													
				Dokumen Money pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan Data Sinergitas Ketenagakerjaan	dok	1	85.830.000													
		jumlah Peserta bimtek Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	perush	40																
		Jumlah peserta rapat persiapan penetapan UMK Kota Serang	org	21																
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jml peserta kegiatan hari buruh internasional	org	50	33.012.500													
				Dokumen Rekomendasi LKS Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	dok	1	42.856.750													
Jumlah bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial				org	40															
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Kesepakatan bersama LKS Tripartit, DEPEKO dan Gugus Tugas EEO dalam membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Serang dan meningkatnya SDM	dok	3	41.810.000														
Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigrasi	Meningkatnya Kesiapan calon transmigran	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen Kerjasama Antar Daerah	dok	1	112.025.000													
			Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Peserta sosialisasi/seleksi tentang program transmigrasi regional	org	1	47.960.750													
	Meningkatnya Kemandirian Transmigran	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah KK transmigran yang dibina di lokasi penempatan	KK	1	146.175.000													

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui Pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang merupakan unsur Pelayanan terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki kedudukan dan fungsi yang penting demi mewujudkan sistem ke Pemerintahan yang baik dalam membangun Pemerintah Kota Serang.

Dalam penggunaan Anggaran Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai target yang harus dicapai, pencapaian target tersebut diiringi dengan Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Capaian Kinerja.



TABEL 3.1

PENCAPAIAN REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
TAHUN 2021									
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 *100	10
<b>TENAGAKERJAAN</b>									
1	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,16			
2		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja		Persentase Angkatan Kerja Yang Berdaya	%	100	100	100,00	
				Persentase Kesempatan Kerja	%	90,95			
				Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	100	100,00	
			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	%	60	40,98	68,30	
			Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100	100,00	
			Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan keterampilan	org	45	45	100,00	
		Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi		org	16	16	100,00		
			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>persentase LPK yang dibina</b>	%	100	100	100,00	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPK yang dibina	org	35	35	100,00	
				Jumlah pengelola LPK yang dibina	LPK	25	25	100,00	
			<b>Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil</b>	<b>persentase perusahaan kecil yang telah dibina</b>	%	100	100	100,00	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina	perush	40	40	100,00	
			<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase peningkatan produktivitas peserta</b>	%	100	100	100,00	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bintek/pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja	org	70	70	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 *100	10
			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Capaian Pencari kerja yang ditempatkan</b>	%	7,5	7,99	106,53	
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan calon tenaga kerja	%	5,25	3,14	59,81	
			Penyedia Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bimtek petugas pelayanan antar kerja	org	80	80	100,00	
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bimtek calon tenaga kerja	org	288	288	100,00	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan (kewirausahaan)	org	40	40	100,00	
			<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase LPTKS yang dibina</b>	%	100,00	100	100,00	
			Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Koordinasi dan pembinaan kepada LPTKS (BKK, P3MI, dan LPTKS lainnya)	org	30	30	100,00	
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>persentase dokumen informasi pasar kerja yang ditetapkan</b>	%	100	100	100,00	
			Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Dokumen data dan Informasi pasar kerja (IPK)	dok	1	1	100,00	
			<b>Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota</b>	<b>Persentase PMI yang dilindungi</b>	%	55,70	20,8	37,34	
			Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta workshop calon pekerja migran Indonesia (PMI)	org	40	40	100,00	
			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan</b>	%	40	36,5	91,25	
			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan</b>	%	100	100	100,00	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta Bimtek persyaratan kerja (E-PP dan PKB)	org	90	90	100,00	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dokumen Monev pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan Data Sinergitas Ketenagakerjaan	dok	1	1	100,00	
				Jumlah Peserta bimtek Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	perush	40	40	100,00	
				Jumlah peserta rapat persiapan penetapan UMK Kota Serang	org	21	21	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 *100	10
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	100	100	100,00	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jml peserta kegiatan hari buruh internasional	org	50	50	100,00	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen Rekomendasi LKS Bipartit dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	dok	1	1	100,00	
				Jumlah bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial	org	44	44	100,00	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen kesepakatan bersama LKS Tripartit, DEPEKO dan Gugus Tugas EEO dalam membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota	dok	3	3	100,00	
<b>URUSAN KETRANSMIGRASIAN</b>									
3		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran		Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	90,7	80	88,20	
			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Capaian Transmigran Yang Ditempatkan</b>	%	30	0	0,00	
			Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	30	28,70	95,67	
			Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan	Dokumen Kerjasama Antar Daerah	Dok	2	2	100,00	
			Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Peserta sosialisasi/seleksi tentang program transmigrasi regional	org	60	60	100,00	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Capaian Transmigran Yang Dibina</b>	%	75	66,67	88,89	
			Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang dibina	%	100	100	100,00	
			Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah KK transmigran yang dibina di lokasi penempatan	KK	15	15	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 *100	10
4		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah		Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah 66,24 B					
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan dan Dokumen perubahan Renstra, PK dan IKU	Dok	5	5	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Dok	1	1	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Dok	1	1	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA	Dok	1	1	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Dok	1	1	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD, Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	Dok Dok	2 4	2 4	100,00 100,00	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD</b>	<b>Dok</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan		12	12	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1	1	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	2	2	100,00	
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD</b>	<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD	dok	1	1	100,00	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut lengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas harian	stel	26	26	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 *100	10
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD</b>	%	100	100	100,00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12	12	100,00	
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	100,00	
				Jumlah Unit (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	unit	8	8	100,00	
			Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	100,00	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	bulan	12	12	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	100,00	
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	bulan	12	12	100,00	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan mamin kunjungan tamu	bulan	12	12	100,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan (perjalanan dinas)	bulan	12	12	100,00	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	100	100,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100,00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kantor	bulan	12	12	100,00	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perintahan Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	100	100,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	unit	21	21	100,00	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Yang Dipelihara	unit	69	69	100,00	

**TABEL 3. 2**  
**PENCAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG**  
**TAHUN 2019-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKONING				PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019		2020		2021	
										KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Partisipasi dan Perutusan Kesempatan Kerja							Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,08	7.890.288.244	9,26	6.308.171.944	9,16	7.705.162.110
		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja						Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya	%	100		100		100	
								Persentase Kesempatan Kerja	%	91,92		90,75		90,95	
								Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100		100		100	
			2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	61,45	1.072.701.500	65	538.201.600	66	828.081.500
			2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	828.877.000	100	455.190.000	100	586.995.500
			2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase LPK yang dibina	%	100	119.000.000	100	-	100	90.970.000
			2	07	03	2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	persentase perusahaan kecil yang telah dibina	%	100	44.600.000	100	30.641.600	100	60.370.000
			2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktivitas pada perusahaan	%	100	80.224.500	100	52.370.000	100	89.746.000
			2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	%	8,82	772.970.000	7,35	252.378.600	7,5	729.108.867
			2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan antar kerja	%		168.464.000		127.180.000	5,25	427.247.000
			2	07	04	2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai fungsi	%		41.450.000		-	100	23.886.000
			2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase dokumen informasi pasar kerja	%		498.144.000		125.198.600	100	122.156.250
			2	07	04	2.04	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	Persentase PMI yang dilindungi	%		64.912.000		-	55,5	155.819.617
			2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	%	30	568.550.000	35	224.385.250	40	307.496.250
			2	07	05	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	%	100	318.433.000	100	134.804.500	100	193.735.000
			2	07	05	2	Prevensi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan	%	100	250.117.000	100	89.580.750	100	113.761.250

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KETRANSMIGRASI	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Angkatan Kerja							Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,08	315.058.000	9,26	195.771.500	9,16	297.290.750	
		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran						Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	90	315.058.000	90	195.771.500	90,7	297.290.750	
			3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	%	17,24	176.752.000	0	93.499.000	30	157.705.750	
			3	32	03	2.01	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	%	17,24		27,7		30		
			3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Capaian Transmigran Yang Dibina	%	57	138.306.000	43	102.272.500	75	139.585.000	
			3	32	04	2.01	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang dibina	%	100		100		100		
<b>KESEKERTARIATAN</b>																
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah						Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	Nilai	66,26		66,28		66,3		
			2	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		100	5.161.008.744	100	5.097.434.994	100	5.543.184.743	
			2	07	01	2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	14	220.274.300	14	166.203.100	16	174.486.500	
			2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Dok	5	3.767.246.750	5	3.702.348.426	3	4.309.200.577	
			2	07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	Dok		29.680.000		20.000.000	1	38.200.000	
			2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	%		-			100	27.010.000	
			2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	%		713.268.449		579.315.900	100	449.968.714	
			2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		-	100	96.882.000	100	-
			2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	66.945.645	100	89.549.783	100	103.785.487	
			2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	%		363.593.600	100	443.135.785	100	440.533.465	

**TABEL 3.3**  
**PENCAPAIAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG**  
**TAHUN 2018-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA				CAPAIAN KINERJA				PRESENTASE CAPAIAN (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10/6 *100	15	16	17
1	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,08	9,26	9,16	8,16	8,08	9,26		100	100	100	0
1		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Kesempatan Kerja	%	91,84	91,92	90,75	90,95	91,84	91,92	90,75	90,95	100	100	100	100
			Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	%	89	90	90	90,7	89	90	90	80	100	100	100	88,20
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Nilai	66,24	66,26	66,28	66,3	66,24	66,26	66,28		100	100	100	0



TABEL 3. 4							
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH							
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG							
TAHUN 2021							
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KETERANGAN
			KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7=6/5 * 100	8
				7.851.608.419	7.705.162.110	98,13	
I	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja						
1		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	832.031.500	828.081.500	99,53	
			Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	586.995.500	586.995.500	100,00	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92.920.000	90.970.000	97,90	
			Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	60.370.000	60.370.000	100,00	
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.746.000	89.746.000	97,82	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	751.383.434	729.108.867	97,04	
			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	436.947.641	427.247.000	97,78	
			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.136.000	23.886.000	91,39	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	131.000.000	122.156.250	93,25	
			Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	157.299.793	155.819.617	99,06	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	314.099.250	307.496.250	97,90	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	196.420.000	193.735.000	98,63	
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	117.679.250	113.761.250	96,67	
	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Angkatan Kerja			306.160.750	297.290.750		
2		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran		306.160.750	297.290.750		
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	159.985.750	157.705.750	98,57	
			Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	159.985.750	157.705.750	98,57	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	146.175.000	139.585.000	95,49	
			Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	146.175.000	139.585.000	95,49	

1	2	3	4	5	6	7=6/5 * 100	8
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.647.933.485	5.543.184.743	98,15	
			Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	176.159.750	174.486.500	99,05	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.376.482.778	4.309.200.577	98,46	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.200.000	38.200.000	100,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.010.000	27.010.000	100,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.278.992	449.968.714	97,34	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.380.000	103.785.487	86,94	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perintahan Daerah	448.421.965	440.533.465	98,24	

**TABEL 3. 5**  
**PENCAPAIAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG**  
**TAHUN 2018-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET ANGGARAN (Rp)				CAPAIAN ANGGARAN (Rp)				PRESENTASE CAPAIAN ANGGARAN (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Partisipasi dan Perluasan Kesempatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp		4.388.000.000	2.714.579.494	3.553.266.141		4.144.172.994	2.610.313.518	3.204.062.033		94,44	96,16	90,17
1		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berdaya	Rp		1.085.000.000	546.091.600	832.031.500		1.072.701.500	538.201.600	828.081.500		98,87	98,56	99,53
			Persentase Kesempatan Kerja	Rp		839.450.000	254.997.000	751.383.434		772.701.500	252.378.600	729.108.867		92,05	98,97	97,04
			Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Rp		580.000.000	229.310.382	314.099.250		568.550.000	224.385.250	307.496.250		98,03	97,85	97,90
2		Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	Rp		380.000.000	199.167.412	306.160.750		315.058.000	195.771.500	27.290.750		82,91	98,29	8,91
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	Rp		1.503.550.000	1.485.013.100	1.349.591.207		1.415.161.994	1.399.576.568	1.312.084.666		94,12	94,25	97,22

## A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai suatu Tatanan, Instrumen, dan Metode, Pertanggung jawaban Pengukuran Kinerja secara khusus membandingkan Pengukuran Kinerja yang dicapai dengan Kinerja yang dicapai dengan Tingkat Kinerja Standar, Rencana atau Target.

Pengukuran Kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kurun waktu dari Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pada awal Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Penetapan Kinerja, terdiri dari 7 Indikator Kinerja sasaran Program guna mendukung sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021.

Manfaat Pengukuran Kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak Internal dan Eksternal tentang pelaksanaan Misi Organisasi dalam rangka mewujudkan Tujuan atau Sasaran dengan menggunakan Strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Berikut ini disampaikan gambaran hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dalam rangka Pencapaian Target sebagaimana Tabel berikut :

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH																		
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2021																		
OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang																		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		KET.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU (Rp)	SD. TRIWULAN IV				KET.
						REALISASI	%				KINERJA	SATUAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% KINERJA	% ANGGARAN	
													7.851.608.419	7.705.162.110		98,13		
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Yang Berdaya	Jumlah Peserta Pelatihan yang Berusaha/ Mandiri X 100% Jumlah Peserta Pelatihan	%	100	61/61	100		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Capaian Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	60	%	832.031.500	40,98	828.081.500	68,30	99,53	Karna terkait pandemi jadi perusahaan belum bs menyerap secara maksimal tenaga kerja secara pelatihan
									Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	%	586.995.500	100	586.995.500	100,00	100,00	
									Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klastar Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan keterampilan	45	org	586.995.500	45	586.995.500	100,00	100,00	
								Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi		16	org			16		100,00		
									Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase LPK yang dibina	100	%	92.920.000	100	90.970.000	100,00	97,90	
									Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah instruktur LPK yang dibina	35	org	92.920.000	35	90.970.000	100,00	97,90	
								Jumlah pengelola LPK yang dibina		25	LPK		25		100,00			
									Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	persentase perusahaan kecil yang telah dibina	100	%	60.370.000	100	60.370.000	100,00	100,00	
									Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang dibina	40	perush	60.370.000	40	60.370.000	100,00	100,00	
									Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas peserta	100	%	91.746.000	100	89.746.000	100,00	97,82	
									Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta bintek/pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja	70	org	91.746.000	70	89.746.000	100,00	97,82	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		KET.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU (Rp)	SD. TRIWULAN IV				KET.
						REALISASI	%				KINERJA	SATUAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% KINERJA	% ANGGARAN	
		Persentase Kesempatan Kerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja_X 100% Jumlah Angkatan Kerja	%	90,95			survey BPS	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Capaian Pencari kerja yang ditempatkan	7,5	%	751.383.434	7,99	729.108.867	106,53	97,04	setelah adanya pandemi perusahaan mulai bangkit kembali sehingga membutuhkan tenaga kerja
									Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan calon tenaga kerja	5,25	%	436.947.641	3,14	427.247.000	59,81	97,78	masih ada beberapa petugas pelayanan antar kerja yang belum melakukan koordinasi dengan disnaker dalam melakukan pelayanan antar kerja
									Penyedia Sumber Daya Pelayan Antar Kerja	Jumlah peserta bimtek petugas pelayanan antar kerja	80	org	195.329.555	80	189.947.000	100,00	97,24	
									Pelayanan Antar Kerja	Jumlah peserta bimtek calon tenaga kerja	288	org	120.708.086	288	117.110.000	100,00	97,02	
									Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan (kewirausahaan)	40	org	120.910.000	40	120.190.000	100,00	99,40	
									Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang dibina	100,00	%	26.136.000	100	23.886.000	100,00	91,39	
									Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Koordinasi dan pembinaan kepada LPTKS (BKK, P3MI, dan LPTKS lainnya)	30	org	26.136.000	30	23.886.000	100,00	91,39	
									Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase dokumen informasi pasar kerja yang ditetapkan	100	%	131.000.000	100	122.156.250	100,00	93,25	
									Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Dokumen data dan Informasi pasar kerja (PK)	1	dok	131.000.000	1	122.156.250	100,00	93,25	
									Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten kota	Persentase PMI yang dilindungi	55,70	%	157.299.793	20,8	155.819.617	37,34	99,06	sehubungan adanya pandemi masih banyak beberapa negara yang ditutup untuk penerimaan PMI
									Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta workshop calon pekerja migran Indonesia (PMI)	40	org	157.299.793	40	155.819.617	100,00	99,06	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		KET.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU (Rp)	SD. TRIWULAN IV				KET.
						REALISASI	%				KINERJA A	SATUAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% KINERJA	% ANGGARAN	
		Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja Yg Diselesaikan X 100% Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	%	100	25/25	100%		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Capaian Hubungan Industrial yang sesuai aturan ketenagakerjaan	40	%	314.099.250	36,5	307.496.250	91,25	97,90	
									Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen hubungan industrial yang ditetapkan	100	%	196.420.000	100	193.735.000	100,00	98,63	
									Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah peserta Bimtek penyusunan kerja (E-PP dan PIG)	90	org	110.590.000	90	108.055.000	100,00	97,71	
									Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dokumen Monev pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dan Data Sinergitas Ketenagakerjaan	1	dok	85.830.000	1	85.680.000	100,00	99,83	
										jumlah Peserta bimtek Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40	perush		40		100,00		
										Jumlah peserta rapat persiapan penetapan UMK Kota Serang	21	org		21		100,00		
									<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase dokumen pencegahan dan perselisihan HI yang ditetapkan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>117.679.250</b>	<b>100</b>	<b>113.761.250</b>	<b>100,00</b>	<b>96,67</b>	
									Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jml peserta kegiatan hari buruh internasional	50	org	33.012.500	50	33.012.500	100,00	100,00	
									Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen Rekomendasi LKS Biparti dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	1	dok	42.856.750	1	42.856.750	100,00	100,00	
										Jumlah bimtek penyelesaian perselisihan hubungan industrial	44	org		44		100,00		
									Palaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	document konsultasi bersama LKS Tripartit, DEPEKO dan Gugus Tugas EEO dalam membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota	3	dok	41.810.000	3	37.892.000	100,00	90,63	
	Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigran	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigran	Jumlah Transmigran yang Bertahan X 100% Jumlah Tansmigran yang Ditempatkan	%	90,7	28 / 35	80%		<b>URUSAN KETRANSMIGRASIAN</b>									
									<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Capaian Transmigran Yang Ditempatkan	30	%	159.985.750	0	157.705.750	0,00	98,57	Karena tidak ada penempatan transmigrasi tahun 2021 sesuai arahan provinsi dan pusat
									Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase calon Transmigran yang terseleksi	30	%	159.985.750	28,70	157.705.750	95,67	98,57	
									Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan	Dokumen Kerjasama Antar Daerah	2	Dok	112.025.000	2	110.195.000	100,00	98,37	
									Penyuluhan transmigrasi	Jumlah Peserta sosialisasi/seleksi tentang program transmigrasi regional	60	org	47.960.750	60	47.510.750	100,00	99,06	
									<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Capaian Transmigran Yang Dibina	75	%	146.175.000	66,67	139.585.000	88,89	95,49	
									Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Persentase Transmigran yang dibina	100	%	146.175.000	100	139.585.000	100,00	95,49	
									Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah KK transmigran yang dibina di lokasi penempatan	15	KK	146.175.000	15	139.585.000	100,00	95,49	

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		KET.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU (Rp)	SD. TRIWULAN IV				KET.
				REALISASI	%				KINERJA	SATUAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% KINERJA	% ANGGARAN	
Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah 66,24 B	Capaian Hasil Evaluasi LKJIP Perangkat Daerah	%	66,30			belum ada penilaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasa n pelayanan Kesekretariatan	100	%	5.647.933.485	100	5.543.184.743	100,00	98,15	
							Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15	Dok	176.159.750	15	174.486.500	100,00	99,05	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan dan Dokumen perubahan Renstra, FK dan IKU	5	Dok	96.363.000	5	94.903.500	100,00	98,49	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1	Dok	2.569.000	1	2.569.000	100,00	100,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1	Dok	2.394.000	1	2.394.000	100,00	100,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA	1	Dok	2.368.000	1	2.368.000	100,00	100,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	1	Dok	2.368.000	1	2.368.000	100,00	100,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD,	2	Dok	70.097.750	2	69.884.000	100,00	99,70	
								Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	4	Dok		4		100,00		
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	3	Dok	4.376.482.778	3	4.309.200.577	100,00	98,46	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan	12		4.298.342.278	12	4.231.100.077	100,00	98,44	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dok	993.000	1	993.000	100,00	100,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	2	Dok	77.147.500	2	77.107.500	100,00	99,95	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi BMD pada PD	1	Dok	38.200.000	1	38.200.000	100,00	100,00	
							Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD	1	dok	38.200.000	1	38.200.000	100,00	100,00	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian PD	100	%	27.010.000	100	27.010.000	100,00	100,00	
							Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas harian	26	stel	27.010.000	26	27.010.000	100,00	100,00	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TRIWULAN IV		KET.	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU (Rp)	SD. TRIWULAN IV				KET.
						REALISASI	%				KINERJA	SATUAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% KINERJA	% ANGGARAN	
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	100	%	462.278.992	100	449.968.714	100,00	97,34	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	7.893.140	12	7.834.000	100,00	99,25	
									Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12	bulan	156.821.405	12	152.912.650	100,00	97,51	
										Jumlah Unit (Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	8	unit		8		100,00		
									Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	40.439.485	12	38.360.500	100,00	94,86	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	12	bulan	20.736.000	12	20.736.000	100,00	100,00	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	53.987.202	12	53.676.900	100,00	99,43	
									penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	12	bulan	24.476.760	12	22.230.000	100,00	90,82	
									Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan mamink kunjung tamu	12	bulan	34.040.000	12	31.353.000	100,00	92,11	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan (perjalanan dinas)	12	bulan	123.885.000	12	122.865.664	100,00	99,18	
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	119.380.000	100	103.785.487	100,00	86,94	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	40.200.000	12	24.825.487	100,00	61,75	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kantor	12	bulan	79.180.000	12	78.960.000	100,00	99,72	
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	448.421.965	100	440.533.465	100,00	98,24	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	21	unit	402.261.965	21	394.374.465	100,00	98,04	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Yang Dipelihara	69	unit	46.160.000	69	46.159.000	100,00	100,00	

Berdasarkan Pengukuran Kinerja di atas ditetapkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3		4	5	8
1	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	PERSEN	9,16 %	%	%
		Persentase Angkatan Kerja Yang Berdaya	PERSEN	100 %	100%	100%
		Persentase Kesempatan Kerja	PERSEN	90,95 %	%	%
		Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	PERSEN	100 %	100%	100 %
2	Meningkatnya Kepesertaan dan Ketahanan Hunian Transmigrasi	Capaian Kepesertaan dan Ketahanan Berhuni Transmigrasi	PERSEN	90,7 %	80%	88,2%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah pada Lingkup Pemerintah daerah	Nilai Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan	PERSEN	100%	0	0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Angka	66,30		

## **B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

Strategi kebijakan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu Tahun. Dalam rangka mengetahui Pencapaian Sasaran diukur dengan Indikator- Indikator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah ditetapkan. Strategi kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut

### **Kebijakan Umum**

#### **a) Kebijakan Ketenagakerjaan**

- 1) Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dalam upaya penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada kepentingan pekerja dan perluasan kesempatan kerja dengan didukung penyebaran informasi bursa Tenaga Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja.

- 2) Perluasan Kesempatan Kerja yang memfasilitasi Pencari Kerja.

Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek Tenaga Kerja produktif yang semula dipandang objek Pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu Pembangunan.

Pandangan baru yang melihat Tenaga Kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara Pemilik Modal (Pengusaha) dengan Pekerja ke arah kemitraan.

Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara Pemilik modal dan Pekerja.

- 3) Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja
- 4) Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja sangat dibutuhkan. Kebijakan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis.

- 5) Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah Pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat khususnya Masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas.

## **b) Kebijakan Ketransmigrasian**

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran di Kota Serang dengan melaksanakan sosialisasi tentang Program Penyelenggaraan Transmigrasi.
- 2) Melatih dan mendidik calon Transmigran agar siap mental dan siap ditempatkan.

## BAB IV

### TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021

#### **A. Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG Tahun 2020 oleh INSPEKTORAT KOTA SERANG**

Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim APIP Kota Serang Kami mendapatkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

##### **1 Perencanaan Kinerja**

- a) Dokumen Renstra agar dipublikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan public untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang rencana program dan kegiatanyang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun;
- b) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) agar dipublikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan public untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dalam mewujudkan capaian sasaran strategis yang dijanjikan;
- c) Dokumen Rencana Aksi agar mencantumkan sub-kegiatan /komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kineja;
- d) Agar pencapaian target – target kinerja sasaran menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;

##### **2 Pengukuran Kinerja**

- a) Agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP;
- b) Dokumen IKU agar dipublikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan public untuk mengakses

dan mengetahui informasi tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang;

- c) Agar seluruh target dalam rencana aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran);
- d) Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
- e) Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

### **3 Pelaporan Kinerja**

- a) Dokumen laporan kinerja agar dipublikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan public untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang pencapaian sasaran strategis/capaian kinerja yang telah ditetapkan;
- b) Laporan kinerja hendaknya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan target dalam jangka menengah atau standar Nasional.

### **4 Evaluasi Kinerja**

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang agar mengingatkan kembali pemantauan yang sudah dilakukan dan melakukan analisis terhadap persoalan yang ada serta rencana aksi pemecahan masalahnya dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.

### **5 Pencapaian sasaran /Kinerja organisasi**

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang agar melakukan penyempurnaan terhadap isi materi LKjIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyajikan capaian kinerja lebih baik dari

tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan.

## **B. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2021**

### **1. Perencanaan Kinerja**

- a) Dokumen rencana strategis (RENSTRA) akan di publikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang rencana program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (Lima) Tahun;
- b) Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) akan di publikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui informasi komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang dalam mewujudkan capaian sasaran strategis yang di perjanjikan;
- c) Dokumen rencana aksi sudah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja.
- d) Tercapainya target – target kinerja sasaran sudah disampaikan dalam rapat bulanan bahwa akan menjadi persyaratan dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.

### **2. Pengukuran Kinerja**

- a) Akan membuat standar operasional prosedur (SOP) yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP.
- b) Dokumen IKU akan dipublikasikan baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.



- c) Akan dilaksanakan Seluruh target dalam rencana aksi diukur realisasinya secara berkala (bulan/triwulan/semester)
- d) Pengukuran kinerja akan dikembangkan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
- e) Hasil pengukuran capaian kinerja akan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

### **3. Pelaporan Kinerja**

- a) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Serang akan mempublikasikan pelaporan kinerja baik melalui website pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui tentang pencapaian sasaran strategis / capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- b) Laporan kinerja akan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan target dalam jangka menengah atau standar Nasional.

### **4. Evaluasi Kinerja**

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang akan meningkatkan kembali pemantauan yang sudah dilakukan, dan melakukan analisa terhadap persoalan yang ada serta rencana aksi pemecahan masalahnya serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.

### **5. Pencapaian sasaran /Kinerja organisasi**

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Serang akan melakukan penyempurnaan terhadap isi materi LKjIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyajikan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya serta informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahNya telah memperkenankan kami menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LKjIP ) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun Anggaran 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja untuk Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Tahun 2021 Dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta sebagai bentuk PertanggungJawaban kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan menguraikan secara sistematis tahapan kegiatan dari perencanaan dan

realisasinya serta tahapan dalam pengambilan suatu kebijakan.

Sebagai proses pembelajaran, dokumen ini tentunya masih banyak kelemahan yang terjadi. Untuk itu, saran perbaikan terhadap laporan ini kami harapkan dalam rangka penyempurnaan. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun, semoga berguna dan bermanfaat.